

Rogoh Kocek Rp3,5 Juta, Ade Yasin Beli Selimut Limbah Konveksi

LEUWILIANG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin tak segan membeli selimut berbahan baku limbah kain perca ibu-ibu PKK Kecamatan Leuwiliang seharga Rp3,5 juta.

Meski relatif dalam merogoh koeknya, Ade Yasin menilai produk selimut tersebut memiliki nilai seni tinggi.

"Sampah atau limbah di lingkungan seperti kain perca ternyata kalau diolah dan daur ulang memiliki nilai yang lumayan hingga tinggi. Karena memiliki nilai seni yang tinggi dan menghargai kreativitas, saya membelinya," kata Ade Yasin kepada wartawan, Selasa (26/10).

Ade Yasin menjelaskan, dengan usaha daur ulang limbah kain perca pun bisa dimanfaatkan kembali dan menjadi produk baru seperti keset, taplak meja, ser-

bet hingga selimut atau bed cover.

Sementara itu, Ketua PKK Kecamatan Leuwiliang, Zaitunnisa Widayarsi Daswara mengaku butuh waktu sebulan untuk membuat selimut yang indah dari bahan baku limbah kain perca tersebut.

"Perajin selimut atau bed cover berbahan baku kain perca ini ada lima orang. Mereka mengerjakan satu selimut atau bed cover dalam waktu sebulan, prosesnya sendiri dilakukan dengan mesin jahit maupun dengan jahit tangan," ucap Zaitunnisa.

Dia menambahkan, selain selimut atau bed cover ibu-ibu binaannya juga memproduksi kerajinan tangan lainnya mulai gantungan kunci, vas bunga, taplak meja, bunga hias, alas kaki, dan bingkai foto. ● **gio**

Capaian Vaksinasi Covid-19 di Tangsel Hampir 80 Persen

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi warga Kota Tangsel dari berbagai kalangan. Hingga saat ini, realisasi vaksinasi Covid-19 di wilayah tersebut tercapai hampir 80 persen.

"Hingga 25 Oktober 2021, capaian vaksinasi dosis satu sebanyak 825 ribuan atau 77 persen dari target 1,07 juta," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, Selasa (26/10).

Sementara itu, capaian vaksinasi dosis kedua secara keseluruhan tercatat sebanyak 574 ribuan atau 53,5 persen dari target yang sama. Kalangan yang paling rendah capaian vaksinasinya adalah remaja, sementara yang paling banyak petugas publik.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangsel, jumlah kalangan remaja usia 12-17 tahun yang sudah divaksinasi dosis satu sebanyak 37 ribu atau 28,4 persen dari target lebih dari 130 ribu. Adapun dosis dua mencapai 31,7 ribu atau tercapai 24,3 persen dari target yang sama.

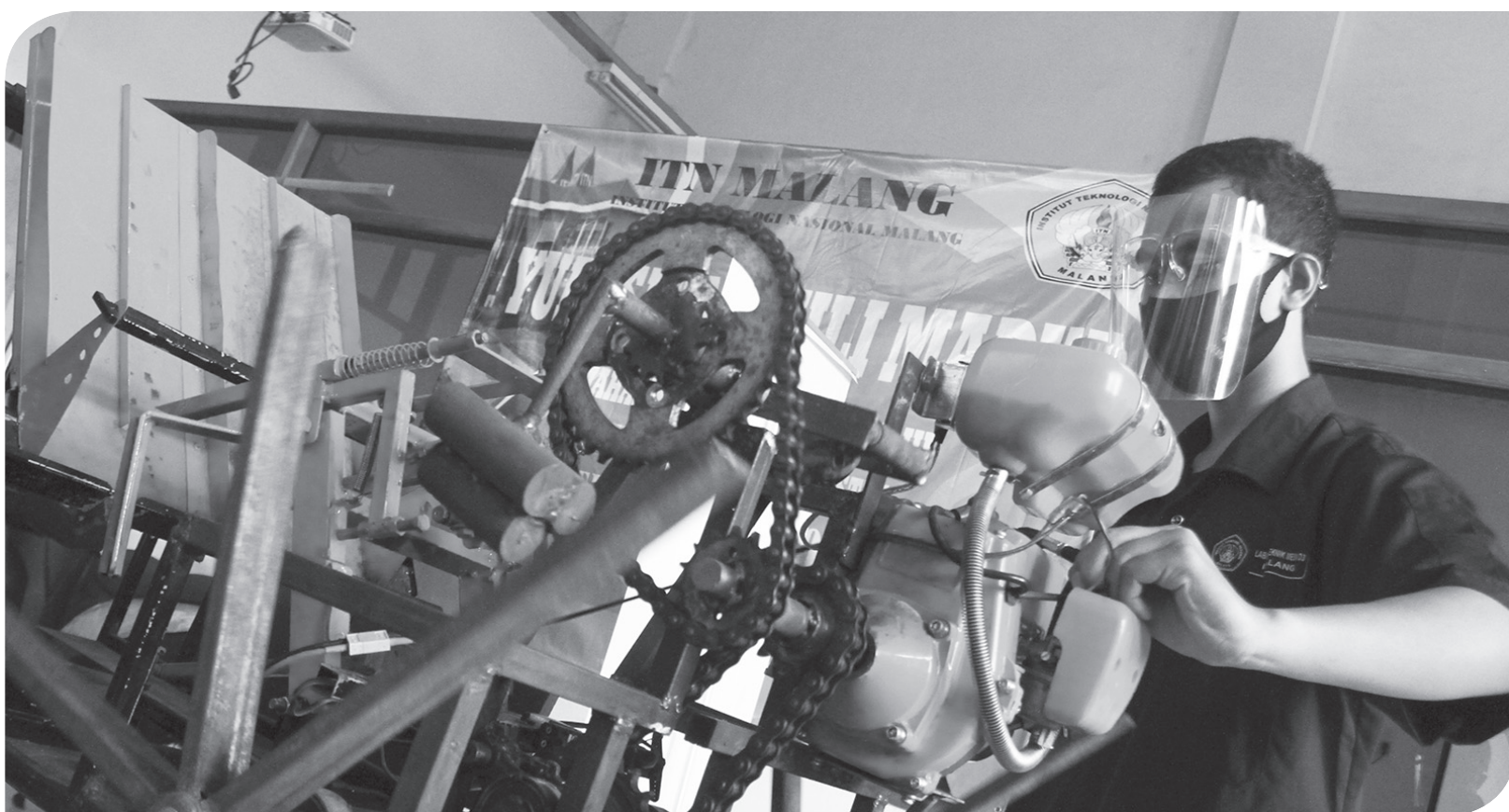
Kemudian, kalangan lanjut usia (lansia) sebanyak 46 ribu (52 persen) orang pada dosis satu dan 37 ribu (42 persen) orang pada dosis

dua dari target sebanyak 87 ribu. Selanjutnya, realisasi vaksinasi pada masyarakat rentan dan umum pada dosis satu sebanyak 482 ribu (61 persen) orang dan dosis dua 300 ribu (38 persen) jiwa dari target sebanyak lebih dari 786 ribu jiwa.

Data menunjukkan, capaian vaksinasi dosis satu di kalangan tenaga kerja telah tercapai 14 ribu atau 162 persen dari target sebanyak 8.901 jiwa. Dan dosis dua sebanak 13 ribu atau 151 persen dari target yang sama. Adapun, kalangan petugas publik dengan realisasi sebanyak 244 ribu jiwa pada dosis satu atau 408 persen dan 192 ribu jiwa pada dosis dua atau 318 persen dari target sebanyak 60 ribu jiwa.

Allin memastikan, pihaknya terus mengencakan kegiatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity dan menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Tangsel. "Kami fokus di level RW. Kita dorong tenaga kesehatan yang sudah punya mantri keliling itu kita dorong untuk melakukan vaksinasi di RW-RW berapung jumlahnya. Terutama bagi lansia, ini yang kita prioritaskan," jelasnya. ● **pp**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

INOVASI ALAT PENANAM PADI OTOMATIS

Mahasiswa menunjukkan cara kerja purwarupa mesin penanam padi otomatis hasil inovasinya di bengkel D3 Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional (ITN), Malang, Jawa Timur, Selasa (26/10). Alat penanam padi otomatis berpengerak mesin pemotong rumput tersebut dirakit dengan komponen pengendali jarak jauh sehingga bisa dioperasikan dari jauh.

Redistribusi Tanah ke Petani Penggarap di Bogor Terkendala Kasus BLBI

Ade Yasin mengatakan, jajarannya ingin tanah eks hak guna usaha (HGU) milik obligor penerima likuiditas Bank Indonesia di Kecamatan Jasinga untuk didistribusikan, namun karena tanah itu sitaan DJKN dalam kasus BLBI, maka Pemkab Bogor dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, akhirnya mengurungkan niat baik tersebut.

CIBINONG (IM)- Proses redistribusi tanah ke masyarakat petani penggarap di Kabupaten Bogor terkendala banyaknya lahan yang masuk dalam kasus Bantuan Likui-

ditas Bank Indonesia (BLBI) hingga dalam status sita Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)

Kabupaten Bogor, Ade Yasin mengatakan beberapa waktu lalu, jajarannya ingin tanah eks hak guna usaha (HGU) milik obligor penerima likuiditas Bank Indonesia di Kecamatan Jasinga untuk didistribusikan, namun karena tanah itu sitaan DJKN dalam kasus BLBI, maka Pemkab Bogor dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, akhirnya mengurungkan niat baik tersebut.

"Redistribusi tanah di Desa Cikopmanyak maupun Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga terpaksa kami batalkan karena ternyata dalam pengawasan DJKN karena masuk dalam kasus BLBI," kata Ade kepada wartawan, Selasa (26/10).

Wanita berusia 53 tahun yang sejak Tahun 2018 lalu menjabat sebagai Bupati Bogor

ini menuturkan jajarannya tidak akan meneruskan program redistribusi tanah di dua bidang lahan tersebut, karena tidak ingin bermasalah dengan hukum.

"Kami tau ini akan bermasalah dengan hukum apabila ngotot menredistribusikan tanah untuk para petani penggarap, mungkin kami akan berkonsultasi dengan DJKN, untuk bagaimana baiknya," tuturnya.

Ketua Harian Tim GTRA dan sekaligus Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Apchanto menerangkan alasan jajarannya akan menredistribusikan tanah di Desa Cikopmanyak maupun Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga karena sudah banyak masyarakat yang tinggal di dua bidang lahan tersebut.

"Redistribusi tanah di dua desa di Kecamatan Jasinga ini

kami anggap sangat penting dan menjadi prioritas, karena di lokasi banyak masyarakat yang sudah menguasai atau tinggal di lahan tersebut, namun ternyata tanah-tanah tersebut dalam pengawasan DJKN," terang Sepyo.

Sementara Kabid Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto menjelaskan selain di Kecamatan Jasinga, di kecamatan lainnya juga ada lahan yang disita atau dalam pengawasan DJKN.

"Tim GTRA Kabupaten Bogor tentunya akan mencari solusi terkait permasalahan lahan-lahan yang dalam pengawasan DJKN. Kami akan meminta kepastian hukumnya, apakah boleh di redistribusikan kepada para petani penggarap," jelas Eko. ● **gio**



IDN/ANTARA

LOMBA KREASI DAUR ULANG LIMBAH KAIN PERCA

Sejumlah peserta mengikuti lomba kreasi daur ulang limbah kain perca di Gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10). Lomba tersebut digelar guna mensosialisasikan cara pemanfaatan sampah serta meningkatkan kreativitas pengolahan limbah menjadi barang kerajinan tangan yang bernilai untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

SOAL HARGA RP300 RIBU

Ridwan Kamil: Kalau Bisa Harga PCR Lebih Murah

BANDUNG (IM)- Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mendukung Presiden Jokowi yang meminta harga tes PCR turun menjadi Rp 300 ribu. Menurutinya, biaya pengetesan yang lebih terjangkau, akan lebih meningkatkan masyarakat.

"Intinya harga harus murah-murahnya, tapi pengamanannya harus seaman-amannya. Kalau tanpa testing baik antigen atau PCR, kita ibaratnya terlalu gegabah, karena kita belum usai (pandemi), baru surut Covid-nya," ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/10).

"Saya mendukung harga tes itu semurah-murahnya, kalau pak Jokowi mengarahkan di bawah 300 ribu itu akan lebih meringankan, kalau bisa lebih murah lagi," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Selain lebih murah, Emil juga meminta agar hasil tes bisa keluar lebih cepat. Sebab, ia menilai bahwa warga yang melakukan perjalanan tak serta-merta melakukan rekreasi ke tempat wisata.

"Kedua jangsan terlalu

lama-lama, kasihan, kan tidak semua orang bergajian itu untuk wisata. Ada urgensi keluarga dan lain-lain. Mudah-mudahan secepatnya ada ukuran baru pengetesan lebih murah. Tapi kewaspadaan tidak bisa ditawar-tawar," tutur Emil.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan harga tes PCR diturunkan. Selain itu, presiden juga menyebut masa berlaku PCR bagi penumpang pesawat menjadi 5x24 jam.

Dia mengatakan pemerintah mendapat banyak masukan dan kritik terkait kewajiban tes PCR untuk naik pesawat. Dia menjawab pertanyaan warga mengapa tes PCR menjadi syarat naik pesawat saat kasus Korona turun.

"Kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran semakin meningkat karena mobilitas penduduk meningkat pesat beberapa minggu terakhir," ucap Luhut. ● **pur**

WUJUDKAN EFEKTIFITAS PERSURATAN BERBASIS DIGITAL

Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi Srikandi

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, melakukan ekpose uji coba penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di tiga Perangkat Daerah yakni Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Umum Setda Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat IV Setda Kabupaten Bogor, Senin (25/10). Hal ini dimaksudkan dalam rangka efektifitas persuratan di Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan bahwa, arsip atau dokumen merupakan kategori urusan wajib karena dokumentasi sangat penting, setiap pekerjaan mulai dari sarana prasarana, pembiayaan dan personal tidak terlepas dari dokumen.

Ia berharap kehadiran Aplikasi SRIKANDI bisa menyelesaikan berbagai permasalahan kearsipan di Kabupaten Bogor. "Saya ingin SRIKANDI ini bisa ter-connecting hingga tingkat Pemerintah Desa, karena arsip itu sifatnya ada arsip aktif dan arsip in aktif, dan ada yang sangat rahasia," ungkap Burhanudin.

Sekda meminta untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, untuk mendukung optimalisasi penerapan aplikasi SRIKANDI. "Agar dokumen penting dan rahasia bisa terarsipkan secara

digital dengan baik, mulai dari dokumen pembangunan, perizinan, pemeliharaan jalan, dan lainnya," tuturnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, Tb Luthfi Syam menerangkan, bahwa Arsip Nasional RI telah membuat aplikasi yang bersifat nasional yakni aplikasi SRIKANDI dan sudah menjadi kesepakatan antara Arsip Nasional, Kemkominfo, dan Kemenpan. Itu seiring dengan kewajiban baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tb Luthfi Syam menambahkan, beberapa langkah konkrit yang telah dilakukan yakni Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat akun 30 perangkat daerah dan kecamatan, 20 di perangkat daerah dan 10 kecamatan. Telah dibuatkan draft aksi kebijakan berupa Keputusan Bupati Bogor tentang Penerapan SRIKANDI dalam tata kelola persuratan. Kemudian dirinya juga telah melakukan penginputan tata persuratan berupa template Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Surat, Masa Simpan Surat dan Hak Akses Surat ke dalam master data SRIKANDI sehingga ada keseragaman. Termasuk menginput semua struktur organisasi di tiap perangkat daerah sehingga dapat mempermudah.

"Termasuk melakukan Bimtek, kami juga lakukan simulasi secara terbatas di tiga perangkat daerah yakni di Bagian Umum Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kita juga mempelajari dimana titik-titik kelemahannya. Kami ingin di tahun 2022 SRIKANDI ini bisa kita terapkan di Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Tb Luthfi Syam menambahkan, jika SRIKANDI sudah bisa diterapkan dan dijalankan pencarian arsip dapat dilakukan dengan cepat dan jauh lebih mudah, karena hanya dengan mengetik kata kunci sesuai arsip yang dibutuhkan, serta tidak perlu menggunakan tempat yang terlalu luas, karena SRIKANDI ini adalah sistem informasi kearsipan dinamis.

"Kalau kita tidak memulai secara digital, pertanyaan besarnya adalah kapan kita mau memulai, kalau kita tidak memulai kita harus mencari tanah lagi, kita harus membangun gedung lagi hanya semata-mata untuk menyimpan arsip," ujarnya.

Katanya, penerapan SRIKANDI ini tentunya memerlukan yang namanya infrastruktur pendukung, baik itu pada uji coba maupun pada pelaksanaan yang akan datang. Jika SRIKANDI ini sudah dilaksanakan akan sangat mudah, semua pemaparan sifatnya sudah digital, lalu disposisi juga sifatnya digital. Termasuk juga yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah ada perpustakaan digital, dan di dalam perpustakaan itu sudah di-inject buku Bodas sekitar 1.907 yang merupakan bagian dari Karsa Bogor Cerdas. ● **gio**



IDN/ANTARA

KERAJINAN TENUN CIREBON

Perajin menyelesaikan pembuatan tenun sarung di desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (26/10). Kerajinan tenun yang dipasarkan ke berbagai daerah tersebut dijual seharga Rp250 ribu hingga Rp10 juta tergantung motif.

Pemkab Bogor Perluas Digitalisasi Layanan Pajak

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) memperluas digitalisasi pada layanan perpajakan, mulai dari antrean secara daring hingga penyediaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis Android.

"Kami berkomitmen untuk mendorong dan membangun budaya inovasi melalui kolaborasi dan kompetisi di berbagai sektor, salah satunya dengan kebijakan one institution, one innovation dan one village, one innovation," ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Senin (25/10).

Aplikasi PBB online yaitu memberikan pelayanan bagi penerapan PBB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bogor. Aplikasi bernama e-PBB Kabupaten Bogor bisa diunduh di Playstore oleh siapapun. Ade Yasin menyebutkan, inovasi tersebut sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah, di mana Bappenda berperan sebagai sekretariat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

melalui pengelolaan pajak daerah yang berbasis digital.

Kemudian, Bappenda Kabupaten Bogor menyediakan layanan antrean daring atau online melalui website resminya. Fitur tersebut daring hingga penyediaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis Android. Melalui antrean online, masyarakat dapat memperoleh nomor antrean hanya dengan menggunakan sambungan internet. Masyarakat juga dapat memilih tanggal dan waktu pelayanan serta jenis pelayanan yang dituju sesuai kebutuhannya.

Secara teknis, tiket antrean setiap harinya dibagi dalam tiga pilihan sesi, yaitu pukul 08.00-10.00 WIB, 10.00-12.00 WIB, dan 13.00-15.00 WIB. Antrean online diluncurkan pada saat masa pandemi Covid-19, tujuannya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal dan tidak terganggu.

Sebab, antrean secara konvensional dinilai kerap menimbulkan kerumunan. Ade Yasin mengatakan, antrean online tersebut sudah efektif untuk mengindahkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. ● **gio**

Siswa dan Guru Terpapar Covid-19 di Bandung Terus Bertambah

BANDUNG (IM)- Siswa dan guru yang mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) kembali beralih ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kasus Covid-19. Siswa dan guru di sekolah tersebut terpapar Covid-19 melebihi angka lima persen.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra mengatakan terdapat 14 sekolah yang kembali menyelenggarakan PJJ akibat terdapat kasus Covid-19. Keempat belas sekolah tersebut terdiri dari 5 SD, 2 SMP, 2 SMA, 4 SMK dan 1 SLB. "Sesuai dengan ketentuan tindak lanjut surveilans, 14 sekolah tersebut harus kembali melaksanakan PJJ karena jumlah siswa yang terpapar berada pada persentase lebih 5 persen," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima, Minggu (24/10).

Hingga 21 Oktober, ia menuturkan terdapat 80 siswa dan empat orang guru terpapar oleh Covid-19. Terdapat 2.511 sampel memiliki hasil negatif sedangkan 864 sampel masih menunggu hasil. "Sekolah belum dapat diklasifikasikan sebagai klaster penyebaran Covid-19. Saat ini Disdik masih menunggu hasil entry dan exit test yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung," katanya. ● **pur**